

**NASKAH PUBLIKASI**

**BUSINESS FOR PEACE: PENDEKATAN BARU PBB MELALUI  
UN GLOBAL COMPACT DALAM PEMBANGUNAN DAN  
PERDAMAIAN**

**(Business for Peace : The New Approach of United Nations Through  
UNGC in Development and Peace)**



Disusun Oleh:

**Yolanda Dwi Adea**

**20141060047**

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2016**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Dengan ini saya selaku mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Yolanda Dwi Adea

NIM : 20141060047

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Yolanda Dwi Adea

20141060047

# **BUSINESS FOR PEACE: PENDEKATAN BARU PBB MELALUI UN GLOBAL COMPACT DALAM PEMBANGUNAN DAN PERDAMAIAN**

Yolanda Dwi Adea

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [Yolanda.adea@gmail.com](mailto:Yolanda.adea@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out why the United Nations, through the UN Global Compact seeks to implement the Business for Peace in various countries, including in the developing world, why this initiative is so important for the business sector, community, and government, as well as how the strategy and implementation in developing countries. By using the concept of social reality, social construction, and positive liberal peace theory in analyzing problems in this study, the results showed that the Business for Peace is important in changing the view and can construct the relationship between the business sector, community, and government. In addition, this platform can mobilize and directing actors from the business sector to be active and effectively plays a role in establishing peace, stability and sustainable development. With common interests and goals, either globally, such as the Sustainable Development Goals (SDGs) as well as other interests, both regionally and nationally, all stakeholders can work together and collaborate to find solutions and actions that appropriate and effective through the UNGC and various platforms, including the Business for Peace.*

Keywords: Business for Peace, United Nations, UN Global Compact, Peace, Sustainable Developments, SDGs.

## A. Pendahuluan

Sektor bisnis telah sering kali menjadi perdebatan apakah sektor ini menjadi sebuah keuntungan atau justru kerugian dalam konteks konflik, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku ekonomi merupakan pemain utama dalam transformasi masyarakat. Mereka dapat terlibat secara positif maupun negatif selama masa konflik.

Terdapat berbagai system ekonomi yang telah ada di dunia hingga saat ini, seperti *Laissez Faire*, kapitalis, sosialis demokrat, sistem ekonomi komunis, dan sebagainya. Namun, apapun sistemnya, perusahaan dan pelaku bisnis merupakan salah satu aktor yang memainkan peran penentu, baik sebagai pemicu konflik atau justru mentransformasikannya. Hal ini karena mereka adalah salah satu aktor yang bisa menentukan dan mempengaruhi situasi sosial-ekonomi di dunia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sektor bisnis bisa menjadi anugrah maupun kutukan dalam transformasi konflik.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ekonomi telah menjadi akar di hampir semua konflik di seluruh dunia. Berbagai konflik terjadi karena ada kepentingan bisnis di balik itu, bahkan konflik juga terjadi antara pelaku bisnis itu sendiri dengan masyarakat sekitar. Misalnya Shell di Nigeria atau DeBeers di Angola dan Liberia. Demikian pula, di Indonesia, terdapat banyak isu yang menyebabkan konflik antara pelaku bisnis dan masyarakat. Dapat kita lihat dalam kasus AQUA dengan penduduk Klaten contohnya, atau kasus pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta, dan banyak lagi konflik lainnya.

Akan tetapi, di sisi lain justru sektor bisnis juga dapat berperan dalam proses perdamaian. Dalam konteks ini, ada beberapa keuntungan untuk memasukkan sektor bisnis dalam proses *peacebuilding*, yaitu dapat berpengaruh dalam hal kekuatan keuangan, dapat langsung menyentuh masyarakat, jaringan nasional kamar dagang dan koneksi ke otoritas politik.<sup>2</sup>

Selanjutnya, perdamaian itu sendiri juga sangat dibutuhkan oleh sektor bisnis, jadi sudah sepantasnya bila sektor bisnis juga dapat berperan dalam menciptakan

---

<sup>1</sup> Miall, H. (2004). *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Berlin: Berghof Research. Berlin: Berghof Research.

<sup>2</sup> Upreti, B. R., Ghimire, S., & Iff, A. (2012, July). *Is Peace the Business of Business? An Exploration of Corporate Role in Conflict Transformation*. Discussion Paper. South Asia Regional Coordination Office. NCCR North-South.

perdamaian. Sebab bukan saatnya lagi untuk berfikir tentang “how to get what” tapi “what is the right thing to do in a situations and how”. Sebab situasi yang dapat kita lihat selama dekade terakhir adalah akibat dari kekuatan transformasi politik dan globalisasi ekonomi yang telah menciptakan sebuah dunia dengan peluang serta harapan baru di satu sisi, tetapi dapat meningkatkan ketidakstabilan di sisi lain.

Ketika kita memasuki abad ke-21, konflik kekerasan terus mempengaruhi kehidupan jutaan orang, merusak kemajuan manusia dan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> Situasi ini juga memiliki implikasi terhadap sektor bisnis itu sendiri. Bukan hanya ekonomi yang memberikan efek transformasi dalam konflik, namun konflik juga mempengaruhi transformasi kegiatan ekonomi. Sehingga saat ini, keuntungan ekonomi bukanlah satu-satunya kepentingan bagi sektor bisnis, namun perdamaian juga menjadi kepentingan bagi mereka. Contoh sederhana dapat dilihat pada bisnis lokal. Pebisnis lokal sering kali memiliki kepentingan sendiri dalam perdamaian, karena konflik dapat mempengaruhi kelancaran bisnis mereka dan akan memakan banyak biaya, seperti biaya keamanan, biaya manajemen resiko, kerugian material, kerugian modal, biaya personil, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Memang beberapa bisnis dapat berkembang dalam situasi konflik. Namun, sebagian besar bisnis yang berkembang dalam lingkungan yang damai dan dalam ekonomi yang damai selalu melebihi jumlah bisnis yang berkembang dalam konflik atau dalam ekonomi perang. Oleh karena itu, transformasi konflik dapat menjadi pekerjaan yang mulia untuk sektor korporasi dalam mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan pemulihan yang stabil. Sebab mulai dari perusahaan multinasional besar hingga usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan perdamaian dan mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi. Mereka juga memiliki peran dalam memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berperan dalam pencegahan dan resolusi konflik.

Oleh karena itu, agar sektor bisnis dapat memainkan peran dalam perdamaian, diperlukan suatu pendekatan. Dalam hal ini, PBB, melalui United Nation Global Compact menawarkan Business for Peace sebagai pendekatan baru untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak diresmikan pada tahun 2013 lalu oleh Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, Business for Peace atau yang disebut juga dengan B4P menjadi

---

<sup>3</sup> Nelson, J. (2000, January). Business of Peace: THE PRIVATE SECTOR AS A PARTNER IN CONFLICT PREVENTION AND RESOLUTION.

<sup>4</sup> ibid

platform baru UNGC untuk terus disebarakan agar diimplementasikan di berbagai Negara, salah satunya adalah di Indonesia.

## **B. Studi Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Untuk menentukan posisi sudut pandang atau perspektif dalam menganalisa masalah yang diangkat dan memetakan tulisan-tulisan yang bertema serupa dengan apa yang penulis angkat, serta untuk mengembangkan road map penelitian atau pengembangan perluasan kajian tema tersebut dengan menampilkan perspektif baru atas tema yang diangkat dalam tesis ini, maka penulis telah mereview beberapa jurnal penelitian.

Pertama adalah jurnal *Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development*, oleh Jason Miklian dan Peer Schouten yang mengatakan bahwa pandangan *Business for Peace* ini dapat kita kaitkan dengan nama-nama seperti Immanuel Kant, Joseph Schumpeter, dan Francis Fukuyama, yaitu scholar yang mengkombinasikan unsur politik republik, demokrasi dan 'semangat perdagangan' dengan cara yang berbeda untuk sampai pada gagasan bahwa disposisi institusi domestik menyebabkan 'ikatan kosmopolitan' yang positif dan berkorelasi pula dengan kecenderungan kebijakan luar negeri yang damai. Ini merupakan cabang dari teori perdamaian liberal, yaitu *positive liberal peace theory* yang dalam hal ini menekankan peran lembaga liberal untuk membawa perdamaian melalui lembaga pasar. Ini menyatakan bahwa lembaga transnasional dan rezim dapat mengatasi masalah tindakan kolektif dan transaksi yang menimbulkan konflik dengan mempromosikan saling ketergantungan, dan bahwa eksternalitas potensi pasar bebas yang tak terkendali dapat dan harus diatasi dengan menanamkan mereka dalam arsitektur institusional. Teori perdamaian liberal positif langsung menginformasikan agenda yang telah mendominasi sampai timbulnya B4P.<sup>5</sup> Sehingga B4P perlu digunakan sebagai paradigma dan pendekatan untuk mencapai perdamaian.

Selain itu, menurut UNGC (2005), bahwa keterlibatan sosial sektor korporasi dapat membuat sektor bisnis menjadi mitra yang potensial dalam upaya rekonstruksi pasca konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Hal ini juga dapat mengakibatkan keterlibatan tersebut membantu mereka mendapatkan 'izin

---

<sup>5</sup> Miklian, J., & Schouten, P. (2014, December 8). *Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development*. PRIO/NAI Working Paper.

sosial untuk beroperasi' dari para pemangku kepentingan lokal. Keterlibatan kemanusiaan ini kemudian menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa berterimakasih, sehingga sektor bisnis akan menjalankan perannya dalam konteks perdamaian. Hal ini dikarenakan adanya transformasi hubungan dan budaya humanisme. Bantuan kemanusiaan juga dapat memberikan keuntungan bagi sektor bisnis. Sektor korporasi dapat memberikan bantuan atau persediaan darurat lainnya kepada pemerintah dan instansi pemerintah agar dapat diberikan secara gratis ke tempat-tempat yang terkena dampak konflik. Dengan demikian, keterlibatan kemanusiaan aktor korporasi memiliki manfaat ganda untuk para aktor korporasi sendiri.<sup>6</sup>

Akan tetapi disisi lain menurut R. Paris bahwa “the liberal peacebuilding agenda has failed precisely in the places where it has been needed most.” Satu dekade setelah peluncuran Millenium Development Goals, inisiatif ini telah membawa keuntungan ekonomi di Negara-negara berpenghasilan rendah di mana efisiensi lembaga sudah di track yang benar, akan tetapi gagal di zona yang lebih rapuh dan terkena dampak konflik yang lebih besar. Sering kali pula liberal institutional project ini sangat ditentang oleh lokal, tidak mengatasi akar penyebab konflik, dan dapat berakhir menguntungkan hanya faksi tertentu dari masyarakat. Liberal peace theory justru berujung tidak liberal maupun menyebabkan perdamaian. Akan tetapi, akibat tidak adanya alternative, pembangunan yang berdasarkan liberal peace terus menjadi kerangka dalam aksi perdamaian kontemporer dan telah mulai diselenggarakan.<sup>7</sup>

Namun, menurut penelitian Swisspeace yang pada tahun 2010 lalu menerbitkan sebuah studi di Divisi Politik Keamanan Manusia mengenai peran pengusaha dalam proses mediasi.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan swasta memiliki peran penting untuk bermain dalam proses mediasi Track 1, yang berperan dalam menyediakan sumber daya, keahlian, jaringan, dan lobi untuk mencapai perdamaian. Pada saat yang sama, penelitian ini menemukan bahwa

---

<sup>6</sup> Upreti, B. R., Ghimire, S., & Iff, A. (2012, July). Is Peace the Business of Business? An Exploration of Corporate Role in Conflict Transformation. Discussion Paper. South Asia Regional Coordination Office. NCCR North-South.

<sup>7</sup> Paris, R. (2010). Saving liberal peacebuilding. *Review of International Studies*, 36, (2): 337.

<sup>8</sup> Iff, A., Alluri, R., Kohler, D., & Sguaitamatti, D. (2010). Money Makers as Peace Makers? Business Actors in Mediation Processes. *swisspeace Working Paper 2*.

pengusaha lokal memiliki potensi untuk memainkan peran yang relevan dan aktif di trek yang lebih rendah, yaitu sebagai mediator dan fasilitator.

Selain itu, dengan menghormati aturan hukum dan mematuhi tenaga kerja serta lingkungan standar internasional, perusahaan dapat juga berkontribusi terhadap perdamaian. Mars Incorporated misalnya, telah mendukung the Sustainable Tree Corps dan membantu dalam mengembangkan the Cocoa Livelihoods Program untuk mengevaluasi sektor kakao dari Ghana dan daerah lainnya. Mars bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi pekerja anak dan melindungi pekerja di setiap tingkat rantai, dari ladang ke pabrik-pabrik. Perusahaan juga telah berkomitmen untuk sertifikasi seluruh pasokan kakao pada tahun 2020, semua 250.000 ton per tahun, sebagai berkelanjutan. Juga tentang menghormati aturan hukum, seperti korupsi yang dapat memicu ketidakstabilan dan konflik kekerasan, bisnis dengan prinsip-prinsip etika yang kuat dan kebijakan toleransi nol terhadap praktik korupsi. Sehingga menurut penelitian Swisspeace, tentu sektor bisnis dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan dan perdamaian, hanya saja diperlukan cara, jalan, atau pendekatan yang sesuai agar sektor bisnis dapat menjalankan perannya tersebut.

Kemudian penulis akan menggunakan beberapa konsep ataupun teori yang akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisa fenomena yang diangkat.

## 1. Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial

### a. Konsep Realitas Sosial

Dalam Fenomenologi terdapat istilah “Lebenswelt” (*‘life-world’* atau ‘Dunia Kehidupan’) yang terdiri dari dunia atau semesta yang rumit dan lengkap, termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, interaksi antar manusia (intersubyektifitas) dan nilai-nilai yang dihayati. Lebenswelt merupakan realitas sosial sebagaimana dipahami dan dianut oleh orang-orang awam dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>9</sup>

Selanjutnya Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa “realitas” dalam artinya sebagai ‘sesuatu yang nampak’ sebenarnya adalah ‘fakta’, namun dalam maknanya yang tidak hanya sebagai sesuatu (*being*) yang

---

<sup>9</sup> Wardana, Amika, Ph.D. *Fenomenologi II: Trilogi Realitas Berger-Luckmann*. Handout Kuliah 10. Teori Sosiologi Kontemporer, Universitas Negeri Yogyakarta.

disadari, diketahui, atau bahkan yang dipahami dan diyakini (*realized*) boleh dan ada di dalam alam pemikiran manusia. Maka yang namanya ‘realitas’ itu tak mesti berhenti pada konsep realitas sebagai realitas individual, melainkan realitas yang menjadi bagian dari kesadaran, pengetahuan, dan/atau keyakinan suatu kelompok sosio-kultural. Yang tersebut akhir inilah yang dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial disebut ‘realitas sosial’, sekalipun yang dimaksud dan ditunjuk sebagai ‘kelompok sosiokultural’ disini hanya kelompok kecil saja, malah mungkin hanya terdiri dari dua individu yang tengah berintegrasi.<sup>10</sup>

Berger juga menjelaskan bahwa realitas tercipta dalam pengalaman dan pemahaman intersubjektif antar individu secara terus menerus dalam sebuah interaksi sosial khususnya lewat media bahasa. Realitas sosial tercipta dan terpelihara dalam relasi dialektis antar individu dan dunia disekitarnya. Upaya memahami realitas dilakukan dengan melihat proses interaksi dialektis antara diri (individu) dan dunia kenyataan sosio-kulturalnya yang berlangsung terus menerus tanpa akhir tersebut.

Selanjutnya dinyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial, dan sosiologi ilmu pengetahuan harus menganalisa bagaimana proses itu terjadi. Keduanya mengakui adanya realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan kita (sebab sesungguhnya fenomena tersebut tidak dapat dihindarkan).<sup>11</sup> Berger menegaskan pula bahwa realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Melalui proses internalisasi atau sosialisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat.

#### b. Konsep Konstruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckmann, asumsi dasarnya yaitu “realitas adalah konstruksi sosial”. Selanjutnya dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme

---

<sup>10</sup> Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 7(2), 1-4.

<sup>11</sup> *ibid*

konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.

Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok (essences) yang benar, realitas adalah konstruksi sosial, hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia yang diterima umum. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (a claim) dan juga sebuah sudut pandang (a viewpoint) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.<sup>12</sup>

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkret. Pengetahuan dan realitas konkret dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai discourse atau diskursus, yakni sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik control demi kekuasaan (power). Tanpa memandang dari mana kekuasaan tersebut berasal, tetapi kekuasaanlah yang mendefinisikan pengetahuan, melakukan penilaian apa yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak boleh, mengatur perilaku, mendisiplinkan dan mengontrol segala sesuatu, dan bahkan menghukumnya. Artinya, subyek manusia sebagai individu, juga dibentuk dan diatur oleh rejim kekuasaan. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial.

Bagi Berger, kenyataan sosial sehari-hari merupakan konstruksi sosial buatan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, dari masa silam ke masa kini, ditata dan diterima, untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan memberikan makna pada berbagai bidang pengalaman individu sehari-hari. Ini menjelaskan, bahwa dunia manusia sebenarnya ditandai oleh keterbukaan, dan perilakunya hanya sedikit saja yang ditentukan oleh naluri. Ia dengan sadar membentuk perilakunya, memaksakan suatu tertib pada pengalamannya. Hal

---

<sup>12</sup> ibid

ini berlangsung secara terus-menerus, dengan kesadaran intensionalnya selalu terarah dan dipengaruhi oleh objek yang berada diluarnya, hingga relasinya dengan masyarakatnya dan segala pranatanya, bersinggungan secara dialektis.<sup>13</sup>

Berdasarkan konsep konstruksi sosial dalam realitas sosial ini, maka dapat kita simpulkan bahwa realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang dapat tercipta karena dipengaruhi oleh bahasa, budaya, waktu, serta institusi-institusinya, yang terus terjadi berulang kali dalam masyarakat sehingga dipahami oleh individu sebagai realitas sosial. Realitas ini dapat berbeda bagi tiap individunya.

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Proses ini dapat berkaitan pula dengan teknik-teknik control demi kekuasaan atau power. Sehingga suatu individu serta kondisi dan hubungan sosial juga dibentuk dan diatur oleh rejim kekuasaan yang terjadi disekitarnya. Begitu pula dengan realitas sosial yang dapat kita lihat dalam hubungan antara bisnis dan masyarakat, di satu sisi dapat menimbulkan konflik, di sisi lain juga justru dapat berperan untuk menciptakan perdamaian itu sendiri. Semua ini merupakan hasil konstruksi yang terjadi antar setiap individu. Hasil ini dapat berbeda-beda di berbagai lingkungan masyarakat.

Akan tetapi, apabila realitas ini merupakan hasil konstruksi dari manusia sendiri maka dapat diubah pula dengan cara mengkonstruksi kembali pemahaman setiap pelaku yang terlibat dengan memanfaatkan hal-hal yang mempengaruhi terciptanya realitas sosial tersebut, seperti budaya, rejim, kekuasaan, dan lain-lain. Maka dari itu, melalui Business for Peace yang merupakan platform dari PBB ini, diharapkan dapat mengubah realitas sosial yang umumnya terjadi antar sektor bisnis dengan masyarakat saat ini, kemudian mengkonstruksinya kembali sehingga kepentingan bisnis dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan beriringan dan menciptakan perdamaian.

---

<sup>13</sup> ibid

## 2. Positive Liberal Peace theory

Dalam *democratic peace theory* atau yang dikenal juga dengan *liberal peace theory* yang dicetuskan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman pada tahun 1795, dengan menggunakan demokrasi dalam perspektif liberal dimana merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut percaya bahwa jika dibangunnya sistem demokrasi liberal dalam suatu negara, maka negara tersebut akan cenderung untuk menghindari perang, kecuali untuk melakukan pertahanan diri.<sup>14</sup>

Doktrin ini terkait dengan nama-nama seperti Immanuel Kant, Joseph Schumpeter, dan Francis Fukuyama, scholar yang mengkombinasikan unsur politik republik, demokrasi dan 'semangat perdagangan' dengan cara yang berbeda untuk sampai pada gagasan bahwa melalui disposisi atau penempatan setiap institusi domestik dalam suatu negara dapat menyebabkan sebuah 'ikatan kosmopolitan' yang positif dan saling berketergantungan sehingga dapat mengakibatkan kecenderungan kebijakan luar negeri yang damai. Pandangan ini menyatakan bahwa lembaga transnasional dan rezim dapat mengatasi masalah tindakan kolektif dan transaksi yang menimbulkan konflik dengan mempromosikan saling ketergantungan, dan bahwa eksternalitas potensi pasar bebas yang tak terkendali dapat dan harus diatasi dengan menanamkan mereka dalam arsitektur institusional.

Selain itu, hubungan antar negara salah satunya didasarkan pada distribusi kepentingan yang dimiliki oleh negara. Dalam hubungan dengan negara lain, preferensi kepentingan tersebut bisa disinkronkan sehingga kerjasama bisa dilakukan. Hubungan antara satu negara dengan negara lain tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan yang bersifat zero-sum (menang atau kalah), namun bisa diharmonisasikan dengan saling memberi dan menerima (mengalah untuk preferensi kepentingan tertentu namun menang untuk preferensi kepentingan yang lain).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mtholyoke, "Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch", <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>, diakses pada 21 Mei 2016.

<sup>15</sup> Wardoyo, Broto. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Nugra Media

Adanya kesamaan kepentingan tersebut memungkinkan adanya keterikatan kepentingan (*linkages*). Jaringan berbagai keterikatan kepentingan (*multiple linkages*) dalam hubungan negara-negara akan menciptakan kondisi yang oleh Keohane dan Nye, Jr. disebut sebagai interdependensi yang kompleks (*complex interdependence*). Dalam kondisi tersebut, perang akan menjadi sangat sulit dilakukan karena adanya berbagai keterikatan kepentingan yang melibatkan berbagai negara atau aktor-aktor di dalam negara. interdependensi yang kompleks tersebut bukan satu-satunya mekanisme yang memungkinkan kerja sama antar-negara bisa dilakukan. Pemetaan yang lebih detail dari paradigm Liberalisme juga menunjukkan bahwa perdamaian atau kerja sama dapat dibangun karena tiga pilar, yaitu demokrasi, perdagangan, dan institusi. Pandangan bahwa dengan memenuhi ketiga pilar tersebut agar perdamaian dapat tercapai, diperkenalkan oleh Kant dalam konsep perdamaian abadi (*perpetual peace*). Ketiga pilar tersebut, menurut Doyle tidak bisa dipahami secara terpisah dan harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup>

Dalam *Three Pillars of the Liberal Peace*, Michael W. Doyle menambahkan bahwa untuk mencapai perdamaian antarnegara juga dibutuhkan tiga pilar, yaitu “*Republican representation, an ideological commitment to fundamental human right, and transnational interdependence*.”<sup>17</sup> Ketiga hal ini tidak cukup apabila dipisahkan, tetapi bila bersama-sama dapat menjadi pilar yang menghubungkan karakteristik politik dan ekonomi yang liberal dengan perdamaian liberal yang berkelanjutan.

Teori perdamaian liberal positif langsung menginformasikan agenda yang telah mendominasi dan hal ini sejalan dengan B4P.<sup>18</sup> Sehingga B4P perlu digunakan sebagai paradigma dan pendekatan untuk mencapai perdamaian. Selain itu, Keyakinan bahwa kewirausahaan ekonomi akan menyebabkan perdamaian dan pembangunan dapat ditelusuri kembali ke John Locke, di mana ia berpendapat bagaimana ekspansi spasial kewirausahaan dan hak milik akan menyebabkan pemerintah sipil dengan karakteristik damai.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Doyle, M. (2005). Three Pillars of the Liberal Peace. *American Political Science Review*, (3): 463-466.

<sup>18</sup> Miklian, J., & Schouten, P. (2014, December 8). Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development. PRIO/NAI Working Paper.

<sup>19</sup> *ibid*

### C. Pembahasan

Dalam dunia yang saling berhubungan, sektor swasta, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda namun saling berhubungan dan memiliki kepentingan bersama dalam hal stabilitas, kemakmuran, perdamaian dan pembangunan. Di dalam mencapai kepentingan tersebut, sektor bisnis dapat menjadi agen perubahan yang sangat kuat.

Melakukan kegiatan usaha yang bertanggung jawab di semua wilayah di dunia dan mengambil tindakan untuk memajukan perdamaian adalah kepentingan semua orang, termasuk bisnis. Konflik dan ketidakstabilan tidak hanya berdampak bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan resiko keseluruhan bagian sektor bisnis. Akan tetapi, perilaku yang bertanggung jawab membutuhkan tindakan proaktif untuk memastikan bisnis bukan hanya tidak melakukan kesalahan ataupun melanggar prinsip, tetapi juga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan dan membantu masyarakat untuk mengatasi tantangan dalam mencapai stabilitas dalam berbagai aspek.

Maka dari itu, UN Global Compact bersama dengan sepuluh prinsip serta berbagai inisiatif yang mereka canangkan dapat berguna untuk mendukung perusahaan dalam mengembangkan kebijakan dan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta selaras dengan sepuluh prinsip tersebut. Terutama apabila perusahaan berada di daerah yang berisiko tinggi terhadap konflik atau menghadapi berbagai halangan lainnya dalam mengembangkan bisnis, salah satu inisiatif UN Global Compact, yaitu Business for Peace dapat menjadi solusi efektif dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab serta mendukung dalam memajukan pembangunan dan perdamaian yang stabil.

Business for Peace (B4P) adalah platform kepemimpinan bisnis yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang bertujuan untuk memperluas dan memperdalam tindakan sektor swasta dalam mendukung perdamaian, baik itu di tempat kerja, pasar dan masyarakat lokal. Platform ini akan membantu perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab serta sejalan dengan sepuluh prinsip UN Global Compact di wilayah konflik dan berisiko tinggi, serta dapat mengkatalisasi tindakan untuk memajukan perdamaian<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> United Nations Global Compact, (2013, September). *Business for Peace*

Tidak terdapat definisi tunggal mengenai apa itu wilayah konflik dan beresiko tinggi, akan tetapi B4P ini sangat relevan dalam berbagai bidang bagi perusahaan dan stakeholders lainnya, termasuk mereka yang mengalami:

1. Konflik kekerasan, termasuk perang atau pemberontakan
2. Peningkatan resiko politik dan sosial atau ketidakstabilan
3. Kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia
4. Transisi dari konflik

Sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan perhatian khusus ketika beroperasi di daerah beresiko tinggi untuk memastikan bahwa hak-hak stakeholder dan kelompok rentan dihormati dan didukung. Contoh perhatian khusus tersebut adalah seperti sangat diperlukannya manajemen rantai pasokan yang peka terhadap konflik, praktek kerja yang bertanggung jawab, pemberantasan korupsi, pengelolaan air yang bertanggung jawab, peduli pada iklim, dan sebagainya. Hal ini merupakan pilar dasar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.

Maka dari itu, apabila perusahaan berkomitmen untuk memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan, penting bagi berbagai perusahaan dan stakeholder untuk menjadi bagian dari UNGC serta B4P, sebab dengan berpartisipasi, mereka akan dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko serta peluang usaha sambil mengurangi biaya operasional. Setiap anggota juga dapat terlibat dalam dialog publik-swasta untuk menetapkan prioritas lokal dan implementasi proyek serta menyelaraskan strategi bisnis dan operasi dengan praktek yang baik dari seluruh dunia. Selain itu, antar anggota dapat saling berbagi tentang pengalaman dari praktek yang pernah muncul dan belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Melalui B4P dan forum-forumnya, perusahaan dan stakeholder juga dapat menunjukkan kepemimpinan serta mendapatkan pengakuan dalam memajukan solusi praktis.

Selain itu, B4P juga memiliki *action areas* yang mereka dukung dalam tindakan sektor swasta untuk memajukan perdamaian dan stabilitas, sebab tidak dapat dipungkiri, sumber ketidakstabilan dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan perusahaan-perusahaan dalam konteks yang berbeda juga akan memiliki peran yang

sangat berbeda untuk bermain dalam situasi yang berbeda pula. Beberapa isu yang diidentifikasi meliputi<sup>21</sup>:

1. Proyek pembangunan infrastruktur
2. Penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, tempat tinggal dan makanan
3. Program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama untuk *excombatans* dan pemuda
4. Mempromosikan hak atas tanah yang adil dan akuisisi
5. Pengelolaan sumber daya alam
6. Mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru
7. Membantu untuk mendorong pemahaman antar-agama dan antar-budaya

Setiap perusahaan yang berkomitmen untuk memajukan perdamaian, dari perusahaan multinasional besar dengan operasi dan rantai pasokan yang mencakup dunia hingga usaha kecil dan menengah yang beroperasi di suatu Negara dapat bergabung dalam B4P dengan menandatangani Statement of Support. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan setuju untuk mengambil tindakan dalam memajukan perdamaian, baik itu di tempat kerja, marketplace, dan masyarakat setempat dengan<sup>22</sup>:

1. Memperhatikan meningkatnya pelaksanaan UN Global Compact di area terkena konflik / beresiko tinggi

Perusahaan harus mengambil tindakan untuk memastikan seluruh operasi hingga rantai pasokan mereka, terutama bagi perusahaan yang berada di area terkena dampak konflik atau area yang beresiko tinggi terhadap konflik, untuk konsisten terhadap sepuluh prinsip UNGC dan standar internasional. Memang tidak membahayakan dan harus tetap menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab di lingkungan ini mungkin merupakan suatu tantangan, namun konsekuensi dari setiap tindakan perusahaan sangatlah besar, baik untuk bisnis hingga untuk masyarakat, sehingga penting bagi setiap perusahaan untuk memperhatikan ini.

2. Mengambil tindakan untuk meningkatkan perdamaian, baik secara individual maupun kolaborasi

---

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> ibid

Perusahaan harus terlibat dalam proyek-proyek dan inisiatif untuk memajukan perdamaian, dan B4P akan mendukung berbagai kegiatan terkait. Mengingat pentingnya konteks lokal, perusahaan didorong untuk berpartisipasi dalam dialog multi-stakeholder untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu lokal di mana sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif. Dengan bekerja secara kolaboratif dengan stakeholder lainnya, termasuk Global Compact Local Networks, perusahaan dapat mengembangkan dan memperluas proyek dan inisiatif untuk membuat kemajuan pada isu-isu lokal yang akan memberikan kontribusi untuk perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. Bahkan perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka dapat menjadi penyokong perdamaian diantara rekan-rekan, karyawan, pelanggan, investor dan masyarakat disekitar mereka.

3. Melaporkan progres setiap tahun

Untuk menunjukkan keterlibatan dan kemajuan yang berkelanjutan, perusahaan didorong untuk menggunakan Communication on Progress (COP) mereka untuk mempublikasikan tindakan mereka. Contoh tindakan perusahaan yang melampaui "do no harm" untuk membantu masyarakat dalam membangun perdamaian akan menjadi komponen garda depan platform ini.

Dalam menerapkan sepuluh prinsip, berbagai inisiatif, serta program-program UN Global Compact, perusahaan tidaklah sendiri. Para perusahaan dan stakeholders dapat secara bersama-sama tergabung dalam Global Compact Local Networks. Terdapat Global Compact Local Networks yang tersebar di berbagai Negara. Local Networks yang bersedia menjalankan platform B4P juga perlu menandatangani Statement of Support yang menunjukkan kesediaan mereka untuk terlibat dalam pembelajaran, dialog dan tindakan kolektif untuk memajukan perdamaian di tempat kerja, marketplace, dan masyarakat lokal. Mereka akan mendukung perusahaan dalam menerapkan sepuluh prinsip UNGC ketika beroperasi di daerah konflik atau beresiko tinggi dan jika memungkinkan, juga akan membantu untuk memfasilitasi dialog multi-stakeholder untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam bidang prioritas. Sehingga bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, tahap baru

perjalanan dapat dimulai. Sebuah perjalanan yang bertujuan untuk menemukan cara yang paling efektif agar sektor swasta dapat berkontribusi dalam mencapai perdamaian, pembangunan dan stabilitas.<sup>23</sup>

Demi menghadapi apa yang terjadi secara global, seperti konflik berkepanjangan yang terus terjadi, hukum kemanusiaan berulang kali dan secara sistematis dilanggar, dan semakin mempengaruhi setiap individu, kehidupan sosial, ekonomi, pembangunan, serta sistem politik di dunia. Ditambah dengan berbagai tantangan dan resiko global yang harus dihadapi, baik dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, seperti resiko imigrasi penduduk dalam jumlah besar, krisis fiskal, energy price shock, kegagalan pemerintahan, perubahan iklim, krisis air, krisis pangan, dan sebagainya yang apabila terus terjadi akan berdampak pada kestabilan dunia, termasuk menyebabkan ketegangan yang dapat menyebabkan konflik yang tersebar di seluruh dunia.

Negara Berkembang dan Negara Kurang Berkembang menjadi yang paling rentan dalam menghadapi berbagai resiko dan tantangan global tersebut, terutama dalam aspek ekonomi. Dalam hal ini, sektor swasta merupakan salah satu aktor penting yang memiliki andil besar dalam menentukan kemajuan perkembangan di negara-negara tersebut. Akan tetapi sering kali pebisnis dan investor, terutama yang berasal dari asing, mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat, salah satunya karena akan mengambil hak masyarakat umum dan saling bersinggungan kepentingan. Memang tidak dapat dipungkiri, terdapat berbagai pebisnis dan investor yang tidak peduli dengan masyarakat, memanfaatkan pemerintah yang korup untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa peduli dengan kepentingan masyarakat. Sehingga mengakibatkan ketegangan dengan masyarakat dan menjadi realitas sosial bahwa sektor swasta seringkali merugikan kepentingan masyarakat, padahal tidak semua pebisnis dan investor beroperasi secara tidak bertanggung jawab. Pandangan ini perlu diluruskan.

Untuk itulah PBB, melalui UN Global Compact menyebarluaskan berbagai pandangan, platform dan inisiatifnya, termasuk Business for Peace di berbagai negara, termasuk Negara Berkembang, agar dapat menciptakan private sector yang bertanggung jawab dan bahkan berperan aktif untuk menciptakan sebuah hubungan kolaborasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah dan stakeholder lain demi

---

<sup>23</sup> ibid

mencapai kepentingan bersama, termasuk dalam mencari solusi bagaimana menghadapi resiko global. Salah satu solusi yang saat ini menjadi fokus global adalah sebuah agenda yang diresmikan oleh PBB dan negara-negara anggotanya, yaitu sebuah agenda yang secara resmi berjudul “Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 goals dan 169 spesifik target di masing-masing tujuan tersebut.

Akan tetapi diperlukan komitmen dan peran aktif dari semua aktor untuk mencapai tujuan bersama ini, sebab aksi dan tujuan tersebut tidak dapat berlangsung secara maksimal apabila tidak mendapat dukungan pula dari pemangku kepentingan lainnya, sebab perdamaian sangat bergantung pada setiap aktor. Maka dari itu, bukan hanya perusahaan, UN Global Compact juga mengundang organisasi masyarakat sipil, investor, akademisi, pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mendukung platform ini.

Selain itu, perusahaan juga semakin mengerti peran mereka dalam mendukung perdamaian dan mengambil langkah aktif untuk membuat perubahan. Akan tetapi, masih sedikit pemahaman tentang pengaruh dari keterlibatan bisnis dalam peacebuilding dan bagaimana mengukur kemajuannya. Bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengambil langkah selanjutnya dalam memberikan dampak positif, mereka harus mengerti dan mendemonstrasikan value dari keterlibatan mereka dalam membuat strategi yang lebih efektif dan berpengaruh.<sup>24</sup>

Bisnis dapat menjadi aktor perubahan yang kuat di dunia yang saling berhubungan seperti ini, di mana private sector, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi memiliki kepentingan bersama dalam hal stabilitas, kemakmuran, perdamaian, dan pembangunan. Untuk itulah UN Global Compact mengajak sektor bisnis untuk melakukan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan minimal “do no harm” di area di mana mereka beroperasi, kemudian lebih dari itu, bisnis ditantang untuk mengejar peluang dalam memecahkan tantangan sosial melalui inovasi bisnis dan kolaborasi. Kedua hal ini merupakan kontribusi yang penting untuk SDGs.

Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) secara spesifik berhubungan dengan membangun perdamaian dan masyarakat yang inklusif. Hal ini

---

<sup>24</sup> United Nations Global Compact, (2015). *Advancing the Sustainable Development Goals by Supporting Peace: How Business Can Contribute*.

terdapat pada goal ke enam belas, yaitu peace, justice, and strong institutions, yaitu untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua orang, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, serta inklusif di semua tingkatan. Tujuan ini memberikan kesempatan penting bagi perusahaan untuk menyelaraskan strategi perusahaan dengan tujuan universal baru dalam perdamaian, dan untuk memperkuat tanggung jawab serta komitmen dalam melakukan upaya ini.<sup>25</sup>

Sedangkan bagi bisnis yang beroperasi di area yang terkena dampak atau beresiko tinggi terhadap konflik, UN Global Compact terus mengembangkan berbagai guidelines, tools, inisiatif untuk mendukung perusahaan agar dapat mengembangkan kebijakan dan menerapkan praktik bisnis bisnis yang bertanggung jawab dan selaras dengan UN Global Compact Ten Principles.

Terdapat tiga spektrum dalam keterlibatan perusahaan dalam lingkungan yang terkena dampak atau beresiko tinggi terhadap konflik :

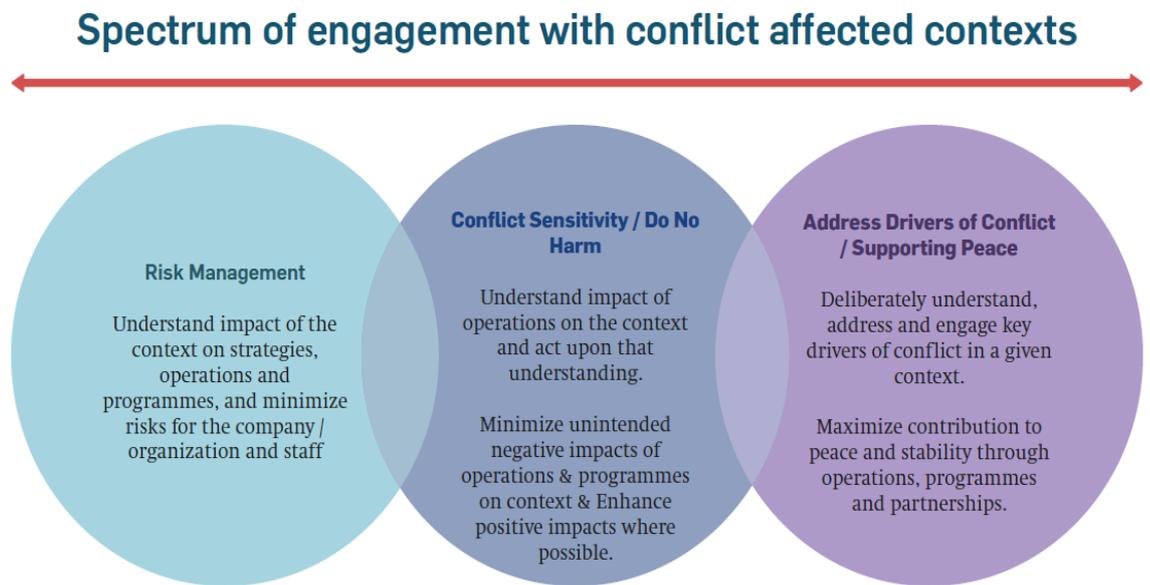


Figure 1 Spectrum of enaement with conflict affected konteks

Manajemen resiko adalah untuk menghindari efek negatif dan dapat berkontribusi terhadap perubahan yang positif, yang apabila memungkinkan, dapat secara langsung pada key drivers atau pendorong utama terjadinya konflik dan kekerasan. Kemudian conflict sensitivity, operasi bisnis yang peka terhadap konflik

<sup>25</sup> ibid

sangat penting untuk semua operasi di daerah konflik, dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk upaya perdamaian yang lebih direct. Perusahaan kemudian dapat mengambil langkah berikutnya, melampaui risk management dan “do no harm” untuk membuat kontribusi demi perdamaian dan mengembangkan strategi untuk mengukur dampaknya terhadap driver konflik.<sup>26</sup>

Perusahaan dapat membuat kontribusi penting untuk perdamaian jika upaya seluruh operasi perusahaan diselaraskan baik core business, keterlibatan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, serta investasi sosial. Dengan Menggunakan UN Global Compact Management Model, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan kontribusi mereka terhadap perdamaian. Hal ini juga menguraikan beberapa tipe kegiatan yang dapat mempengaruhi driver konflik dan perdamaian secara langsung, termasuk pembangunan ekonomi, konsisten sosial dan dialog, kontribusi pada proses perdamaian, serta skill dan kemitraan yang diperlukan untuk melaksanakannya secara efektif.<sup>27</sup>

#### 1. Commit

Memahami mengapa kontribusi untuk perdamaian adalah penting bagi bisnis: Kontribusi untuk perdamaian mencakup sejumlah area yang berada dalam lingkup pengaruh perusahaan, seperti pemberdayaan ekonomi, inklusi etnis, dialog antar publik dan private, good governance, anti korupsi atau efektivitas sektor keamanan. Sifat dari konflik dan jenis serta karakteristik dari perusahaan juga menentukan apa dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi.

#### 2. Asses

Menggunakan analisis konflik untuk menentukan bagaimana membuat kontribusi positif bagi perdamaian: Melakukan analisis konflik ini sangat penting untuk untuk menentukan kontribusi bisnis seperti apa yang dapat dilakukan. Analisis konflik tersebut termasuk mengidentifikasi penyebab dan pendorong yang mendasari terjadinya ketegangan dan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari proses penilaian dan pelaporan atau dilakukan dalam kemitraan dengan lembaga-lembaga lain.

---

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> ibid

3. Define

Menetapkan tujuan dan mengembangkan pendekatan yang relevan untuk memaksimalkan pengaruh terhadap perdamaian: Memenuhi standar yang ada dalam corporate responsibility mungkin atau mungkin tidak memberikan kontribusi langsung bagi perdamaian., tergantung pada apakah mereka relevan terhadap pendorong utama konflik. Kontribusi bisnis untuk perdamaian perlu direncanakan sesuai konteks. Hal ini penting untuk menyertakan artikulasi yang jelas tentang tujuan dalam memaksimalkan dampak terhadap perdamaian. Mengidentifikasi “theory of change” juga penting untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa operasi core business, social investment, dan hubungan dengan pemangku kepentingan baik dari pemerintah ataupun non-pemerintah akan dapat tertuju pada pendorong konflik demi melihat apakah strategi yang dipilih efektif.

4. Implement

Memantau dan mengevaluasi efektivitas program dan efektivitas perdamaian: monitoring dan evaluasi dampak suatu perusahaan pada perdamaian dapat melihat bagaimana seberapa besar konteks, dalam hal ini konflik, dipengaruhi oleh operasi bisnis. Hal ini bukan hanya membutuhkan pengukuran kinerja perusahaan terhadap sasaran dan tujuan (programme effectiveness) , tetapi juga apakah telah berkontribusi terhadap perubahan pada key drivers dari konflik (peace effectiveness). Mengingat kondisi yang berubah dengan cepat dalam konteks konflik, sangat penting untuk juga memantau dan mengevaluasi hasil yang tidak diinginkan dari usaha, baik positif maupun negatif.

5. Communicate

Melaporkan dampak dan kemajuan menuju perdamaian: perusahaan didorong untuk membangun komunikasi dan melaporkan pengaruh atau dampak dan kontribusi mereka kepada pemangku kepentingan dalam mencapai perdamaian.

#### D. Daftar Pustaka

- Doyle, M. (2005). *Three Pillars of the Liberal Peace*. *American Political Science Review*, (3): 463-466.
- Iff, A., Alluri, R., Kohler, D., & Sguaitamatti, D. (2010). *Money Makers as Peace Makers? Business Actors in Mediation Processes*. Swisspeace Working Paper 2.
- Indonesia Global Compact Network, (2013, November). *Growing Inclusive Markets: Kasus-Kasus di Indonesia Volume 2*, Jakarta
- Indonesia Global Compact Network, (2015, Januari) *Laporan Tahun 2014*, Jakarta
- Jahn, B. (2006). *The Tragedy of Liberal Diplomacy: Democratization, Intervention, Statebuilding (Part I)*. *Journal of Intervention and Statebuilding* 1, (1):87-106.
- John Forrer, T. F. (2012, September). *How Business Can Foster Peace*. SPECIAL REPORT.
- Miall, H. (2004). *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Berlin: Berghof Research. Berlin: Berghof Research.
- Miklian, J., & Schouten, P. (2014, December 8). *Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development*. PRIO/NAI Working Paper.
- Nelson, J. (2000, January). *Business of Peace: THE PRIVATE SECTOR AS A PARTNER IN CONFLICT PREVENTION AND RESOLUTION*.
- Ngangi, C. R. (2011). *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 7(2), 1-4.
- Paris, R. (2010). *Saving liberal peacebuilding*. *Review of International Studies*, 36, (2): 337.
- United Nations Global Compact, (2013, September). *Business for Peace*
- United Nations Global Compact, Principles for Responsible Investment. (2013). *Responsible Business Advancing Peace: Examples from Companies, Investors & Global Compact Local Networks*. New York, US
- United Nations Global Compact, (2015). *A Global Compact for Sustainable Development – Business and the SDGs: Acting Responsibility and Finding Opportunities*
- United Nations Global Compact, (2015). *Advancing the Sustainable Development Goals by Supporting Peace: How Business Can Contribute*
- United Nations Global Compact, (2015, Juni). *Second Business for Peace Annual Event: Building Peace, Realizing Sustainable Development*, Meeting Report, New York
- United Nations Global Compact, *UN Global Compact: Implementation Plan for the Sustainable Development*
- Upreti, B. R., Ghimire, S., & Iff, A. (2012, July). *Is Peace the Business of Business? An Exploration of Corporate Role in Conflict Transformation*. Discussion Paper. South Asia Regional Coordination Office. NCCR North-South.
- Wardana, Amika, Ph.D. *Fenomenologi II: Trilogi Realitas Berger-Luckmann*. Handout Kuliah 10. Teori Sosiologi Kontemporer, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wardoyo, Broto. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Nugra Media

World Economic Forum, (2016). *The Global Risks Report 2016, 11th Edition*, Geneva

Hasil Wawancara

Wawancara dengan bapak Y.W. Junardy, President of IGCN, tanggal 25 Februari 2016 di Kantor Sekretariat IGCN, Jakarta

Sumber Online

UNGC, *Government Recognition*,

<https://www.unglobalcompact.org/about/government-recognition>, diakses pada 3 Maret 2016

United Nations Global Compact, *Our Finances*,

<https://www.unglobalcompact.org/about/finances>, diakses pada 3 Maret 2016

Pacific Institute, *Issues We Work On: CEO Water Mandate*,

<http://pacinst.org/issues/corporate-water-stewardship/ceo-water-mandate/>, diakses pada 4 Maret 2016

United Nations Environment Programme, *Caring 4 Climate*,

<http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SustainableandResponsibleBusiness/PartnershipBuilding/GlobalCompact/Caring4Climate/tabid/78933/Default.aspx>, diakses pada 4 Maret 2016

Principles for Responsible Management Education, *Overview*,

<http://www.unprme.org/about-prme/>, diakses pada 4 Maret 2016

Principles for Responsible Investment, *About the PRI*, <http://www.unpri.org/about>, diakses pada 4 Maret 2016

Sustainable Stock Exchanges, *Background*,

<http://www.sseinitiative.org/about/background/>, diakses pada 4 Maret 2016

United Nations Global Compact, *Food and Agriculture*,

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/environment/food-agriculture>, diakses pada 4 Maret 2016

Women's Empowerment Principles, *Overview*,

<http://www.weprinciples.org/Site/Overview/>, diakses pada 4 Maret 2016

Children's Rights and Business Principles, *Homepage: Overview*,

<http://childrenandbusiness.org>, diakses pada 4 Maret 2016

United Nations Global Compact, *Join Business for Peace*,

<https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/peace>, diakses pada 4 Maret 2016

United Nations Global Compact, *UN Global Compact and the Sustainable*

*Development Goals*, <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/background>, di akses pada 14 April 2016

Division for Sustainable Development, *Sustainable Development Goals*,

<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>, diakses pada 14 April 2016

United Nations Global Compact, *UN Global Compact and the Sustainable*

*Development Goals*, <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/background>, diakses pada 26 April 2016

United Nations Global Compact, *Business for Peace Kicks Off Local Network Event*

*Series in Colombia*, <https://www.unglobalcompact.org/news/591-10-30-2013>, diakses pada 2 Mei 2016

United Nations Global Compact, *Business Leaders in Turkey Commit to Advance Peace in Mediterranean Region*,

- <https://www.unglobalcompact.org/news/2041-04-01-2014>, diakses pada 2 Mei 2016
- United Nations Global Compact, *Sudanese Business Leader Commit to Advance Peace and Cooperation with South Sudan*,  
<https://www.unglobalcompact.org/news/2131-11-18-2014>, diakses pada 2 Mei 2016.
- United Nations Global Compact, *Private Sector Roundtable Promotes Inter-cultural and Inter-Religious Peace in Indonesia*,  
<https://www.unglobalcompact.org/news/1241-08-29-2014>, diakses pada 8 Mei 2016
- Mtholyoke, “Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch”,  
<http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>, diakses pada 21 Mei 2016.
- United Nations, Preamble, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/preamble/index.html>, diakses pada 21 Mei 2016
- United Nations, Chapter I: Purposes and Principles,  
<http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>, diakses pada 21 Mei 2016